

KEBIJAKAN LUAR NEGERI OBAMA DALAM KONFLIK TIMUR TENGAH: KASUS LIBYA

Laode Muhamad Fathun

UPN 'Veteran' Jakarta
lm_fathun@yahoo.co.id

Abstract

The ex-US President, Barack Obama, was the first black-president, prompting hopes that he would make a more humanist foreign policy in the United States. Obama comes from the Democratic Party which is aggressively promoting democracy, humanism, and human rights. But in reality, during the two periods of Obama administration, the United States continues to wage war against the Middle East countries, whether directly or indirectly. This article raises the question, what shaped US foreign policy in the Middle East during the Obama administration. To answer the question the writer uses the wholistic and rational actor theory. The finding of this article is that wholistically, Obama does have characteristic differences, but the foreign policy he decided was the same as his predecessor presidents, prioritizing US-political economic interests in the region rather than keeping peace.

Keywords: *Obama, US foreign policy, Middle East, economy-politics interest*

Abstrak

Presiden AS, Barrack Obama, adalah presiden pertama dari warga kulit hitam, sehingga sempat memunculkan harapan bahwa ia akan membuat kebijakan luar negeri yang lebih humanis di AS. Obama berasal dari Partai Demokrat yang gencar mempromosikan demokrasi, humanisme, dan HAM. Namun kenyataannya, selama masa dua periode pemerintahan Obama, AS terus melakukan peperangan terhadap negara-negara Timur Tengah, baik



langsung maupun tidak. Artikel ini memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya melatarbelakangi kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah selama masa pemerintahan Obama. Untuk menjawabnya, digunakan teori wholistic dan rational actor. Temuan artikel ini adalah bahwa secara wholistic Obama memang memiliki perbedaan karakteristik, namun kebijakan luar negeri yang dihasilkannya sama seperti presiden-presiden pendahulunya, yaitu mendahulukan kepentingan ekonomi-politik AS di kawasan daripada menjaga perdamaian.

Kata Kunci: *Obama, Kebijakan Luar Negeri AS, Timur Tengah, kepentingan ekonomi-politik*

Pendahuluan

Barrack Obama, Presiden AS pertama yang berkulit hitam, terpilih dalam pemilu tahun 2008 dengan membawa banyak harapan baru. Saat itu publik AS sangat kecewa dengan kebijakan perang, terutama Perang Irak yang menyebabkan banyak korban di pihak militer AS dan defisit keuangan negara, yang dilakukan Presiden George W. Bush. Obama meraih banyak suara antara lain berkat janjinya untuk menghentikan kebijakan perang. Namun, delapan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016, Obama meninggalkan Gedung Putih dengan mencatat rekor sebagai satu-satunya Presiden AS yang selama dua periode penuh memimpin peperangan. Pada tahun 2016 saja, Obama telah menjatuhkan bom minimalnya 26.171 unit atau setiap harinya rata-rata 72 bom yang diledakkan. Serangan bom dari udara ini dilakukan militer AS di 7 negara, yaitu Suriah, Irak, Afghanistan, Libya, Yaman, Somalia, dan Pakistan.

Di sisi lain, meskipun Obama selalu menekankan bahwa kebijakan perangnya di Timur Tengah adalah dalam rangka perang melawan terorisme, Obama meninggalkan jabatannya dalam kondisi ketika terorisme semakin merajalela di berbagai penjuru dunia. Kehadiran ISIS dan berbagai aksi pengeboman yang dilakukannya telah membuat banyak pemerintah mengalami masalah besar dan harus mengambil berbagai kebijakan domestik untuk memberantars terorisme dan radikalisme. Kelahiran ISIS, tak pelak lagi, adalah salah satu akibat buruk dari kebijakan Obama di Timur Tengah. Seiring dengan gelombang Arab Spring yang menyuarakan kehendak rakyat negara-negara Timur Tengah, Obama (dan hampir semua pemimpin negara Barat dan Arab) menyerukan bahwa Presiden Assad harus mundur. Namun,

ketika upaya penggulingan Assad melalui aksi-aksi demonstrasi massa tidak berhasil, mereka justru memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok milisi bersenjata untuk angkat senjata melawan pemerintah Suriah. Dari proses inilah kemudian lahir ISIS pada tahun 2013.

Hal ini memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya melatarbelakangi kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah selama masa pemerintahan Obama. Dalam artikel ini, penulis akan membahasnya dengan menggunakan teori *wholistic* dan *rational actor*.

Landasan Teori

Dalam memahami studi kebijakan politik luar negeri, kita perlu mempelajari lima unsur dasar ilmu politik, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan atribusi dan distribusi. Negara merupakan aktor yang bertanggung jawab dalam kebijakan luar negeri, sedangkan kekuasaan (*power*) adalah reformulasi dari kemampuan negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam prosesnya, kebijakan politik luar negeri sebuah negara berakar dari sebuah keputusan domestik. Dengan kata lain, dalam posisi ini pembentukan kebijakan luar negeri masih bersifat politis atau intra negara. Selanjutnya pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia disebut sebagai kebijakan pemerintah yang secara legal siap untuk diimplementasikan. Implementasi tersebut jika dilakukan di dalam negeri disebut sebagai kebijakan domestik (*domestic policy*). Tetapi jika sudah melintasi batas tradisional kedaulatan negara berupa wilayah maka fenomena ini sudah menjadi bagian dari studi Hubungan Internasional.

Ada banyak pendekatan dan teori yang dikemukakan para pemikir HI mengenai kebijakan luar negeri (*foreign policy*). Menurut Carlsnaes (2007), dalam kajian kebijakan luar negeri ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah dasar ontologi dari sistem sosial, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar apakah dasar sistem sosial suatu negara yang menjadi objek kajian. Sistem sosial ini akan memiliki dampak, baik itu disengaja atau tidak, kepada perilaku-perilaku individu yang mengambil kebijakan. Dalam hal ini, ada dua dikotomi, yaitu individualisme dan holisme. Individualisme memandang bahwa kajian kebijakan luar negeri harus

difokuskan kepada perilaku individu-individu tertentu, sementara holisme memadamkan bahwa ada struktur sosial yang pasti mempengaruhi aktor-aktor politik sehingga perilaku mereka tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial.

Menurut Carlsnaes, polaritas ontologi (antara individualisme dan holisme) ini berbeda dengan aspek epistemologi yang membahas apakah peneliti memfokuskan kajian pada manusia (aktor politik) dan perilakunya dari sisi 'outside' (di dalam) atau 'inside' (di luar). Dengan kata lain, apakah peneliti menjelaskan (*explaining*) perilaku aktor atau memahaminya (*understanding*). Jawaban yang individualistis pada pertanyaan ontologis akan membawa peneliti pada pilihan epistemologis apakah aktor diperlakukan secara objektif, yaitu sebagai pihak yang 'di luar' dan rasional terhadap sistem sosial atau diposisikan sebagai sosok yang berada 'di dalam' sistem dan melakukan refleksi atau interpretasi (pemaknaan) atas atas sistem. Dalam kedua kasus ini, individu dipandang sebagai sumber utama dalam tatanan sosial.¹

Secara singkat, kedua jenis pendekatan ini dapat dirangkum dalam bagan berikut ini.

	Epistemologi	
Ontologi	Objektivisme	Interpretivisme
Holisme	Perspektif struktural	Perspektif sosial-institusional
Individualisme	Perspektif agen/aktor	Perspektif pemaknaan aktor/ individu

Sumber tabel: Carlsnaes (2007)

Hal senada disampaikan Hudson, yaitu bahwa penelitian terhadap kebijakan luar negeri difokuskan pada aktor dengan dilandasi argumen bahwa segala sesuatu antarnegara terjadi atas keputusan manusia yang menjadi pengambil keputusan. Karena itu, perlu dibangun membangun teori aktor-aktor khusus (*actor-specific theory*) yang menjadi jembatan antara teori umum tentang aktor (*actor-general theory*) dengan kompleksitas dunia yang dibagi dalam tingkat-tingkat analisis untuk melihat *spectrum* dan komponen proses pembuatan keputusan yang menjadi *output* dari perilaku aktor.

1 Carlsnaes, Walter. 2007. "International Relations and Foreign Policy Analysis". Melalui <journals.lub.lu.se/index.php/st/article/download/2040/1615> [11/6/2017]

Sementara itu, Graham Allison menjelaskan adanya tiga model pengambilan kebijakan luar negeri yaitu sebagai berikut:

- (1) *Rational actor* yang lebih menekankan pada peran aktor individual dan bersifat intelektual; proses ini membutuhkan informasi yang sangat baik sebelum mengambil kebijakan dan perlu *leadership* yang matang.
- (2) Model organisasi yang menekankan pada standar operasi sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan.
- (3) Model politik birokrasi yang menitik beratkan pada posisi tawar-menawar dan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam artikel ini, peneliti menggunakan model *rational actor* yang memiliki asumsi bahwa pemerintah AS, dalam hal ini Presiden Obama adalah aktor yang berperan sentral dalam pengambilan keputusan, pemerintah adalah *black box* dengan makna bahwa peneliti tidak bisa mengetahui secara utuh apa yang sebenarnya terjadi karena proses pengambilan keputusan yang tertutup, serta asumsi bahwa pemerintah memproses informasi dan mengambil keputusan berdasarkan rasionalitas, dengan cara menjelaskan tujuan, prioritas, membuat daftar alternatif kebijakan, meneliti konsekuensi dari setiap alternatif, lalu memilih kebijakan yang dipandang terbaik. Model ini senada dengan model analisis *wholistic* yang dikemukakan oleh Alex Mintz yang menyatakan bahwa:

Wholistic decisions are madewhile disregarding the components of the decision. Such decisions are intuitive, involving standard operating procedures (SOPs) and/or the use of analogies. Heuristic and wholistic searches are more process oriented than holistic searches.

Pendekatan *wholistic* menitikberatkan analisis pada pengambil kebijakan, yaitu dengan mempelajari pengalaman, informasi, psikologis, situasi, kegagalan-kegagalan masa lalu, serta tujuan dan impiannya.

Pragmatisme Politik Obama di Timur Tengah

Kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Barack Obama dalam menghadapi konflik di Timur Tengah sudah tentu dilandasi oleh pertimbangan

internal dan eksternal. Pertimbangan internal berkaitan dengan tujuan individual untuk tampil dalam *open image* dengan tujuan mencari citra politik. Sementara itu, pertimbangan eksternal merupakan pertimbangan yang melibatkan kompetisi aktor dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Keterlibatan AS dalam konflik di Timur Tengah sangat terkait dengan upaya AS untuk memperluas kekuasaannya di kawasan tersebut. Namun hal ini juga akan kembali kepada pertimbangan internal, yaitu bagaimana agar kebijakan luar negeri ini dapat menciptakan citra Obama sebagai presiden yang mumpuni dalam mengelola kebijakan luar negeri sehingga peluangnya semakib besar dalam pemilihan presiden di tahap selanjutnya.

Kebijakan luar negeri yang diambil Obama di Timur Tengah menunjukkan kontradiksi. Di Libya dan Suriah, Obama mendukung agenda penggulingan rezim dengan alasan menegakkan demokrasi. Selama ini AS sering menggaungkan jargon "*USA is the champion of democracy*" dan sangat aktif dalam mendorong terjadinya proses-proses demokratisasi di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali di beberapa negara Timur Tengah. Namun, di saat Libya diperangi secara langsung dengan cara membombardir negara tersebut dan Suriah diperangi melalui kekuatan *proxy*, AS justru berhubungan baik dengan negara-negara monarkhi Arab yang sama sekali tidak menegakkan demokrasi dalam pemerintahan mereka. Kontradiksi ini menunjukkan sisi pragmatis kebijakan luar negeri Obama.

Arab Spring merupakan dinamika politik di Timur Tengah dimana rakyat di berbagai negara, dimulai dari Tunisia, Mesir, dan menjalar ke berbagai negara lainnya, melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut mundurnya pemimpin mereka yang sudah sangat lama berkuasa. Gelombang demonstrasi juga muncul di Libya namun ada intervensi militer yang dilakukan AS dan koalisinya sehingga dalam waktu singkat, Presiden Libya, Moammar Qaddafi terguling, bahkan akhirnya tewas. Intervensi militer tersebut diawali dengan lahirnya Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1970 tentang larangan terbang (*no-fly-zone*) di Libya dan perlindungan terhadap warga sipil yang dilandasi oleh Piagam PBB BAB VII pasal 42 tentang intervensi kemanusiaan. Perlindungan terhadap warga sipil atau intervensi kemanusiaan ini kemudian diimplementasikan oleh NATO (AS, Perancis, dan Inggris) dengan melakukan

serangan udara ke Libya. Bom-bom dijatuhkan secara masif di negara tersebut, termasuk membombardir target-target sipil, seperti istana Qaddafi.

Ada 3 faktor yang seharusnya dijadikan pertimbangan dalam serangan militer, yaitu: (1) konflik terjadi dengan intensitas yang sangat tinggi, (2) serangan militer senjata adalah jalan terakhir (berdasarkan asas prioritas dan proporsionalitas), dan (3) negara-negara yang melakukan serangan militer harus bisa menerapkan *chicken game* yang mempertimbangkan kalkulasi jumlah korban sipil dan militer serta faktor biaya. Ditinjau dari perspektif *rational choice*, akan muncul pertanyaan, atas dasar apa ketiga negara tersebut (AS, Perancis, dan Inggris) rela menghabiskan biaya militer yang sangat besar di Libya? Apakah semata-mata demi membela rakyat Libya (yang diberitakan menjadi korban kejahatan kemanusiaan)?

Dari sisi kepentingan Obama, intervensi militer AS di Libya dan keberhasilannya menumbangkan Moammar Qaddafi yang dicitrakan sebagai diktator dan musuh demokrasi, akan menaikkan *political image* AS di dunia internasional. AS kembali tampil sebagai 'polisi dunia' yang memperjuangkan hak-hak demokrasi. Namun, di saat yang sama, muncul pertanyaan, bukankah Obama dan Partai Demokrat selama masa kampanye selalu berusaha menunjukkan sikap anti perang dan berideologi? Mengapa terjadi perubahan sikap, dari humanis menjadi intervensionis? Dengan menggunakan pendekatan *wholistic* kita bisa menyimpulkan bahwa Obama saat itu memiliki misi untuk maju kembali dalam pemilihan presiden periode kedua (2012) dan isu Libya akan sangat baik untuk menunjukkan prestasi Obama dalam mempertahankan demokrasi di Timur Tengah.

Di Suriah, Obama juga memberikan dukungan kepada milisi-milisi bersenjata (yang diistilahkan oleh pemerintah AS sebagai *moderate rebels*) yang memerangi rezim Bashar Assad. Meskipun selama masa pemerintahannya Obama tidak melakukan serangan militer langsung ke Suriah, namun ia menyetujui pengiriman senjata dari AS kepada milisi-milisi bersenjata anti-pemerintah Suriah. Hal ini sangat bertentangan dengan proses demokratisasi. Surat Sekjen PBB kepada Dewan Keamanan PBB 25 Mei 2012 sudah menyebutkan bahwa di samping tentara Suriah melakukan serangan yang menjatuhkan korban di pihak sipil, milisi-milisi bersenjata pun, antara

lain Al Nusra, telah melakukan aksi-aksi pengeboman yang juga merenggut nyawa rakyat sipil. Pada pertengahan 2012 milisi-milisi bersenjata itu mendeklarasikan bahwa perjuangan mereka di Suriah bertujuan mendirikan khilafah. Artinya yang terjadi bukanlah proses demokratisasi.

Latar belakang Obama sebagai sarjana hukum seharusnya memahami adanya pelanggaran hukum internasional dalam kasus Libya dan Suriah ini, yaitu bahwa kedaulatan sebuah negara dan pemerintahan sama sekali tidak boleh dilanggar oleh pihak asing. Citra kepemimpinan kognitisme Obama sebagai seorang sarjana hukum dikalahkan oleh persepsi dan ilusi politik *struggle of power* atau upaya mempertahankan kekuasaan. Dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 7 disebutkan bahwa tidak boleh ada intervensi terhadap negara lain. Namun, AS dengan menggunakan pasal 27, 41, 42, 43 berdalih bahwa serangan atau intervensi itu adalah demi memelihara perdamaian internasional. AS mengabaikan Pasal 33 dan 39 yang menekankan bahwa konflik seharusnya diselesaikan dengan dengan jalan damai (negosiasi) serta *preventive diplomacy*.

Kepentingan Ekonomi-Politik AS di Timur Tengah

Pertanyaan di atas, mengapa AS mau melakukan intervensi di Libya dan Suriah, yang jelas membutuhkan dana yang amat besar, akan terjawab dengan melihat kepentingan ekonomi-politik AS di Timur Tengah. Dalam sejarah kolonial, Timur Tengah merupakan wilayah jajahan Inggris dan Prancis. Namun, pasca Perang Dunia II ketika AS muncul sebagai kekuatan adidaya, peran dan pengaruh AS sangat kuat di Timur Tengah. AS memprioritaskan hubungan baik dengan rezim-rezim monarkhi Arab demi mengamankan suplai minyak dan gas. Secara geopolitik, posisi Timur Tengah memang sangat strategis karena merupakan jalur lalu lintas antarabenua, mulai dari Asia, Afrika, hingga Amerika dan Eropa. Seiring dengan semakin berkembangnya industri di AS yang amat membutuhkan bahan mentah minyak, semakin keras upaya AS untuk menanamkan hegemoninya di Timur Tengah yang merupakan kawasan yang sangat kaya minyak dan gas.

Upaya AS untuk menguasai minyak di Timur Tengah sebenarnya telah terjadi sebelum usainya Perang Dunia II. Pada tahun 1944, ditandatangani

Perjanjian Minyak Anglo-America oleh AS (era Presiden Roosevelt) dan Inggris yang isinya mengatur pembagian sumber-sumber minyak di Timur Tengah. Dalam pertemuannya dengan delegasi Inggris, Roosevelt mengatakan, "Minyak kawasan Persia (Iran) adalah milik kalian. Sedangkan minyak di Irak dan Kuwait dibagi bersama. Namun minyak Arab Saudi adalah milik kami." Presiden AS, Richard Nixon, juga pernah menyatakan, "Siapa pun yang menguasai kawasan Teluk Arab dan Timur Tengah, maka ia akan menguasai dunia, dan suatu hari nanti Teluk Arab akan merasakan kemakmuran yang luar biasa."

Selain minyak, keterlibatan AS di Timur Tengah juga sangat terkait dengan industri militer dan suplai persenjataan bagi milisi-milisi separatis di Timur Tengah. AS kini merupakan negara eksportir senjata terbesar ke Timur Tengah. Sepuluh negara pengimpor senjata AS adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, Korea Selatan, Australia, Taiwan, India, Singapura, Irak, dan Mesir.

Kebijakan intervensionis AS di Timur Tengah juga tak lepas dari posisinya di NATO. Pada masa Perang Dingin, NATO merupakan organisasi militer tandingan Pakta Warsawa. Namun pasca bubarnya Uni Soviet, NATO kini tampil sebagai kekuatan tunggal dan paling kuat di dunia saat ini. NATO kini tidak memiliki 'saingan', namun berubah peran menjadi instrumen militer AS dalam mencapai kepentingannya. Dengan demikian AS tidak lagi berperang sendiri, melainkan dengan mengerahkan NATO. Kebijakan politik luar negeri AS ini AS dapat dilihat merupakan implementasi dari dua paradigma. Pertama, paradigma Munich yang menekankan sikap berhati-hati terhadap munculnya pesaing baru dalam politik internasional, perlunya membangun dan memelihara kekuatan militer yang modern, dan pengiriman pasukan ke luar negeri dalam jumlah besar. Kedua, AS belajar dari kegagalan Vietnam sehingga lebih menekankan diplomasi daripada kekuatan militer. Paradigma kedua ini pernah muncul dalam pidato Obama pada tahun 2007, sebelum ia terpilih sebagai presiden:

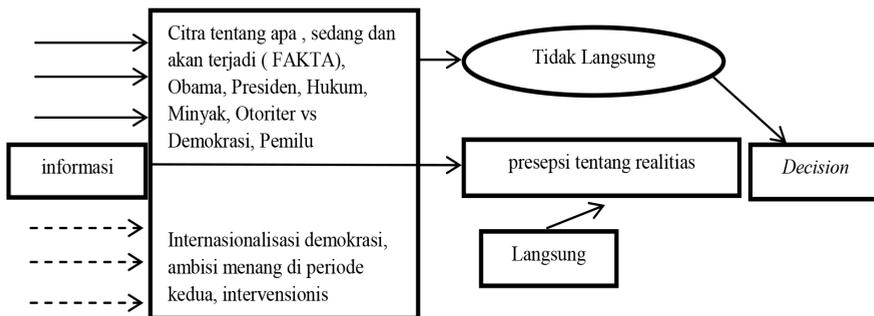
"The mission of the United States is to provide global leadership grounded in the understanding that the world shares a common security and a common humanity. The American moment is not over, but it must

be seized a new. To see American power in terminal decline is to ignore America's great promise and historic purpose in the world.I will start renewing that promise and purpose the day I take office."

Diera Obama, AS mencoba memainkan *smart power* yang menggabungkan dua paradigma tersebut, atau menggunakan metode konfrontatif dan kooperatif sekaligus. Di Libya, Obama melakukan serangan militer langsung bersama NATO, sedangkan di Suriah, Obama memilih bermain di belakang layar dengan mendukung milisi-milisi bersenjata. Dalam hal ini, Obama telah mengabaikan genealogi milisi-milisi tersebut, yaitu dibentuk oleh 'alumni' Al Qaida, yang di saat yang sama diperangi juga oleh AS dalam agenda 'War on Terrorism'.

Model Analisis *Wholistic* Kebijakan Luar Negeri Obama di Timur Tengah

Kebijakan luar negeri Obama di Suriah telah memunculkan efek domino, yaitu semakin kuatnya milisi-milisi yang berafiliasi dengan Al Qaida, dan akhirnya bahkan memicu terbentuknya ISIS, organisasi teror yang mengimpikan terbentuknya kekhalifahan di Irak dan Suriah. Ditinjau dengan pendekatan *wholistic* ini, sangat jelas bahwa Obama telah mengesampingkan birokrasi, *Standar Operating Procedures*, dan ideologi partai. Obama mengulang kisah Bill Clinton yang lebih condong pada kognitisme penasehat Gedung Putih dibandingkan dengan kajian strategis Pentagon. Penarikan pasukan militer AS di Timur Tengah oleh Obama, tanpa persetujuan Pentagon, menjadi sesuatu



Model Analisis Wholistic Obama

yang salah jika melihat misi AS menjaga dominasinya di Timur Tengah juga mengamankan stabilitas Timur Tengah.

Dari model analisis tersebut terlihat bahwa informasi yang diterima Obama akan membentuk citra dan persepsi Obama tentang apa yang terjadi, sedangkan keputusan yang diambilnya akan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik langsung maupun tidak langsung, mulai dari latar belakangnya sebagai ahli hukum, sampai pada ambisi untuk menang dalam pemilu. Ketika akhirnya Obama memilih untuk menyerang Libya, ia sedang berpihak pada ambisinya untuk menang dalam pemilu dengan cara menciptakan *image* bahwa ia mampu menegakkan demokrasi di luar negeri dan melindungi warga sipil yang disebut-sebut sebagai korban kediktatoran Qaddafi.

Keputusan Obama untuk mendukung agenda penggulingan Assad dengan cara *men-support* milisi bersenjata sehingga akhirnya muncul ISIS, membawa masalah besar bagi AS sendiri. Namun kali ini, Obama terlihat gamang saat memutuskan, apakah harus langsung menyerang ISIS di Suriah (yang artinya akan menguntungkan Assad), atau tetap diam. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan narasi yang disampaikan Obama. Pada 27 Januari 2014, Obama masih membela milisi bersenjata di Suriah dengan mengatakan bahwa "Tidak semua kelompok teror mencapai level yang sama dengan Al Qaida."

Lalu pada bulan Juni 2013, Obama mulai terlihat khawatir melihat perkembangan ISIS dan menyebut organisasi ini juga mengancam kepentingan nasional AS. Namun, Obama tetap menolak mengirimkan pasukan ke Irak dan Suriah untuk melawan ISIS. Tapi akhirnya pada Agustus 2014, Obama mengumumkan serangan udara melawan ISIS di Irak dan pada September 2014, serangan itu diperluas ke basis-basis ISIS di Suriah.²

Ada beberapa kritik yang disampaikan pengamat politik AS terkait lambatnya pengambilan keputusan Obama. Michael Rubin dari American Enterprise Institute, mengatakan, "Kita menghadapi sebuah isu mendasar antara seorang presiden yang keyakinan politiknya hendak mencegah pengerahan pasukan versus pihak militer yang profesional yang menilai

2 NBC News. 2015. "ISIS Threat: Obama's Remarks Over the Past Year Show Evolution". Melalui <<http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/isis-threat-obamas-remarks-over-past-year-show-evolution-n304566>> [14/6/2017]

presiden tidak tepat kebijakannya." Mantan Menteri Pertahanan dan Direktur CIA, Leon Panetta, mengkritik kebijakan Obama yang menarik pasukan dari Irak, "...menarik seluruh pasukan kita akan membahayakan stabilitas yang rapuh..."

Sebelumnya pada 2012 Obama menolak untuk mempersenjatai pemberontak Suriah meskipun hal itu diusulkan oleh tim keamanan nasionalnya, termasuk Menlu Hillary Clinton, Direktur CIA David Petraeus, dan Menteri Pertahanan Leon Panetta. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan akhir dari berbagai alternatif pilihan kebijakan luar negeri terkait Suriah ada di tangan Obama.³ Meskipun demikian, akhirnya Obama menyetujui pengiriman senjata kepada pemberontak Suriah.

Keengganan Obama untuk melakukan intervensi langsung dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga *image*-nya sebagai presiden yang humanis. Hal ini tampak dalam pidatonya tahun 2013 yang menunjukkan bahwa ia awalnya menolak menyerang Suriah,

"In that time [2011-2012], America has worked with allies to provide humanitarian support, to help the moderate opposition, and to shape a political settlement. But I have resisted calls for military action, because we cannot resolve someone else's civil war through force, particularly after a decade of war in Iraq and Afghanistan."

Lalu Obama melanjutkan, karena tindakan Assad 'menggunakan senjata kimia', akhirnya ia memutuskan untuk menyerahkan keputusan kepada Kongres AS, apakah serangan ke Suriah perlu dilakukan atau tidak.

"... after careful deliberation, I determined that it is in the national security interests of the United States to respond to the Assad regime's use of chemical weapons through a targeted military strike. ...That's my judgment as Commander-in-Chief. But I'm also the President of the world's oldest constitutional democracy. So even though I possess the authority to order military strikes, I believed it was right, in the absence of a direct or imminent threat to our security, to take this debate to Congress."

3 Dougherty, Jill. 2013. "Kerry distances himself from Clinton backing of arming Syrian rebels" Melalui <<http://security.blogs.cnn.com/2013/02/08/kerry-distances-himself-from-clinton-backing-of-arming-syrian-rebels/>> [14/6/2017]

I believe our democracy is stronger when the President acts with the support of Congress.”⁴

Di sini terlihat bahwa kebijakan luar negeri Obama dari perspektif *wholistic* sangat terkait dengan kalkulasi insting dan naluri serta psikologis dengan pertimbangan keuntungan individualisme terutama terkait dengan upaya mengamankan kekuasaan dan memperoleh citra. Namun ketika akhirnya Obama menyetujui pengiriman senjata kepada pemberontak Suriah pada 2013, lalu mengirimkan pasukan untuk menyerang ISIS di Suriah dan Irak, terbukti juga bahwa serangan tersebut adalah kamuflase untuk melindungi kepentingan AS di kedua negara. Berbagai laporan menunjukkan bahwa serangan AS kepada ISIS di Suriah sering salah sasaran, sehingga yang menjadi korban adalah tentara Suriah yang akan menyerang ISIS, atau warga sipil, atau infrastruktur.⁵ Selain itu, serangan bom yang dilakukan Obama selama masa pemerintahannya telah mengorbankan warga sipil di 7 negara, yaitu Suriah, Irak, Afghanistan, Libya, Yaman, Somalia, dan Pakistan. Pada tahun 2016 saja, Obama telah menjatuhkan bom rata-rata 72 bom setiap harinya.

Sementara itu, di saat yang sama, Obama juga mendukung Arab Saudi yang melakukan serangan ke Yaman sejak Maret 2015. Dalam pidatonya di Riyadh bulan April 2016, Obama menyatakan bahwa AS telah bekerjasama negara-negara Teluk dalam memberantas terorisme dan berkat kerjasama itu, di Yaman sudah ada proses perdamaian.

The fact of the matter is, is that the friendship and cooperation that exist between the United States and the Gulf countries has been consistent for decades. During the course of our administration, the GCC countries have extensively cooperated with us on counterterrorism, on curbing the financing of terrorist activities. They are part of the counter-ISIL coalition that has made progress both in Syria and in Iraq.

4 Teks Pidato Obama 10 September 2013. Melalui <<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/09/10/remarks-president-address-nation-syria>> [14/6/2017]

5 Antara lain, pada September 2016, tentara Suriah yang sedang mempertahankan kota Deir al Zour dari serangan ISIS justru dibom oleh militer AS dan menewaskan 60-an tentara Suriah. <<https://www.commondreams.org/news/2016/09/18/instead-isis-us-led-bombing-kills-nearly-100-syrian-soldiers-fighting-them>> [14/6/2017]

*In Yemen, we now have a cessation of hostilities that allows us to build a peace process that can relieve the suffering of the people inside of Yemen. That would not have happened had it not been for the GCC-U.S. cooperation.*⁶

Pidato Obama ini kontradiktif dengan fakta bahwa Arab Saudi sejak Maret 2015 membombardir Yaman dan hingga kini telah menewaskan lebih dari 10.000 orang. Menurut laporan PBB, kondisi Yaman yang sebelum perang merupakan negara miskin, kini semakin memburuk. Sebanyak 2,2 juta anak-anak sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan dan 462.000 di antaranya berada dalam kondisi malnutrisi yang amat buruk (*severe acute malnutrition*).⁷ Ironisnya serangan ke Yaman yang dimulai pada masa Obama dan masih berlangsung hingga kini, dilakukan atas dukungan AS dan Inggris. Menurut Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al Jubeir, pejabat militer AS dan Inggris ada di ruang komando dan mengetahui target-target pengeboman.⁸

Terhadap Israel yang berkali-kali melakukan agresi ke Gaza, Obama juga menunjukkan dukungannya. Dalam pidatonya di Israel tahun 2013, Obama mengatakan:

*I'm proud that the security relationship between the United States and Israel has never been stronger. Never. More exercises between our militaries; more exchanges among our political and military and intelligence officials than ever before; the largest program to date to help you retain your qualitative military edge.*⁹

Meskipun media kerap memberitakan adanya 'ketegangan' antara Obama dan PM Israel, Netanyahu, terkait negosiasi nuklir AS-Iran dan kritikan Obama terhadap pembangunan permukiman ilegal yang dilakukan pemerintah

- 6 Teks Pidato Obama 21 April 2016. Melalui <<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/21/remarks-president-obama-qa-press-riyadh-saudi-arabia>> [14/6/2017]
- 7 Reuters. 2016. "Child malnutrition at 'all time high' in Yemen: U.N. agency". Melalui <<http://www.reuters.com/article/us-yemen-hunger-idUSKBN14203U>> [14/6/2017]
- 8 Press TV. 2016. "US, UK are in Saudi 'command center' in war against Yemen: Riyadh". Melalui <<http://www.presstv.ir/Detail/2016/01/16/445946/Saudi-Arabia-Yemen-Hadi-Riyadh-UN-UK-US-Jubeir>> [14/6/2017]
- 9 Teks Pidato Obama 21 Maret 2013. Melalui <<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/03/21/remarks-president-barack-obama-people-israel>> [14/6/2017]

Israel, di akhir masa jabatannya, Obama menandatangani bantuan terbesar dalam sejarah AS, kepada Israel. Dalam seremoni pemberitaan bantuan senilai 38 Miliar US Dollar itu, Obama mengatakan bahwa “bantuan ini akan memberikan sumbangan signifikan bagi keamanan Israel yang tengah berada di tengah lingkungan berbahaya” dan “AS adalah sahabat terbesar Israel.”¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa di balik citra humanis dan demokratisnya, kebijakan luar negeri Obama sebenarnya adalah mekanisme berulang. Dengan kata lain, model kebijakan luar negeri Obama tidak berbeda dari presiden pendahulunya. Isu demokratisasi, HAM, dan intervensi kemanusiaan adalah kamuflase bagi kepentingan ekonomi-politik AS di Timur Tengah.

Misi AS sejak era Presiden Nixon hingga kini di Timur Tengah selalu sama, yaitu memenuhi kebutuhan minyak. AS pernah mengalami kesulitan akibat embargo OPEC tahun 1973, dan karenanya sangat menghindari adanya konflik dengan negara-negara Arab penguasa minyak. AS pun menjalin hubungan baik dengan rezim-rezim monarkhi dan di saat yang sama terus mendukung Israel. Perkembangan terbaru, ketika Arab Saudi dan beberapa negara Arab sepakat memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, Presiden Trump tetap berupaya tampil menjadi penengah meskipun di saat yang sama mengecam Qatar sebagai pendana ISIS dan Al Qaida. Hegemoni AS di Timur Tengah dilakukan dengan membawa-bawa jargon demokrasi, HAM, kebebasan; namun di saat yang sama tetap menjalin hubungan baik dengan rezim-rezim yang non-demokratis. Dengan demikian, meskipun Obama terlihat memiliki latar belakang yang berbeda, pandangan humanis, dan pendidikan yang tinggi di bidang hukum, kebijakannya tetap berupa pengulangan kebijakan luar negeri AS selama ini.

Kesimpulan

Terpilihnya seorang presiden dari kalangan minoritas, yaitu keturunan kulit hitam, sempat memunculkan harapan bahwa kebijakan luar negeri AS akan berubah. Sejalan dengan kampanyenya yang anti perang, Presiden Barrack Obama semula diharapkan akan membawa kebijakan luar negeri AS ke arah yang lebih humanis. Apalagi ia didukung oleh Partai Demokrat

10 Reuters. 2016. “U.S., Israel sign \$38 billion military aid package”. Melalui <<http://www.reuters.com/article/us-usa-israel-statement-idUSKCN11K2CI>> [14/6/2017]

yang juga mencitrakan diri sebagai pendukung humanisme, pluralisme, HAM dan demokrasi, serta anti perang. Namun kenyataannya, selama masa dua periode pemerintahan Obama, AS terus melakukan peperangan terhadap negara-negara Timur Tengah, baik langsung maupun tidak. Di Libya, militer AS bersama negara-negara anggota NATO membombardir dari udara hingga akhirnya Qaddafi terguling. Di Irak, AS mengirimkan pasukan udara dan darat dengan alasan untuk menyerang ISIS. Namun di saat yang sama, AS juga membombardir tentara Suriah yang hendak melawan ISIS. Obama menyatakan perang melawan terorisme, namun di saat yang sama pemerintahannya tetap menjalin keakraban dengan negara-negara yang mendanai kelompok-kelompok teror (Al Qaida) di Suriah.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa isu-isu demokrasi dan HAM adalah kamufase dari kepentingan utama AS yang sesungguhnya di Timur Tengah, yaitu kepentingan suplai minyak. Obama tidak bisa melakukan perlawanan terhadap patron kebijakan luar negeri ini sehingga meskipun dia tetap berusaha mencitrakan diri sebagai sosok antiperang dan humanis, Obama tetap melakukan intervensi militer ke berbagai negara, di antara 7 negara muslim seperti Irak, Suriah, Yaman, dll. Obama juga melanjutkan kebijakan luar negeri para pendahulunya, yaitu memberikan bantuan dana, militer, dan politik kepada Israel dengan jargon bahwa 'AS adalah sahabat terbesar Israel.'

Sebagai dampak dari kebijakan luar negeri Obama di Suriah, yaitu memberi dukungan kepada milisi-milisi bersenjata yang memerangi pemerintah Suriah, aksi-aksi terorisme semakin meluas. ISIS tidak hanya memiliki simpatisan yang berada di Suriah atau Irak, tetapi di berbagai penjuru dunia. Akibatnya aksi-aksi pengeboman bunuh diri terjadi beberapa kali di berbagai negara selain Suriah dan Irak, antara lain di Indonesia, Perancis, London, dan Teheran. Perdamaian di Suriah dan Irak juga masih jauh dari kenyataan meskipun Obama selalu mengklaim bahwa aksi intervensi militernya di Timur Tengah adalah demi melindungi rakyat sipil.